

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi *e-auction* dalam pelayanan lelang negara di KPKNL Semarang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan *e-auction* telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumuman, pendaftaran, penyetoran jaminan, pelaksanaan lelang secara daring, hingga penetapan pemenang. Sistem yang digunakan mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, memperluas aksesibilitas masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan, pelaksanaan *e-auction* telah didukung oleh komunikasi yang cukup jelas, sumber daya manusia yang kompeten, disposisi aparatur yang mendukung, serta struktur birokrasi yang memiliki standar operasional prosedur yang jelas.
2. Kendala dalam implementasi *e-auction* di KPKNL Semarang masih ditemukan, namun telah diupayakan penanganannya secara bertahap. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang belum stabil, tingkat literasi digital masyarakat yang masih beragam, potensi risiko keamanan sistem, serta keterbatasan dalam integrasi sistem. Selain itu, sosialisasi kepada

masyarakat juga belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPKNL Semarang telah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan sistem secara berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan *e-auction*.

4.2 Saran

1. Bagi KPKNL Semarang

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi *e-auction* dalam pelayanan lelang negara, KPKNL Semarang disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sistem dan pelayanan *e-auction* melalui penguatan infrastruktur teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pembaruan sistem secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan stabilitas dan keandalan platform *e-auction*, sehingga dapat meminimalisir gangguan teknis selama proses lelang berlangsung. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan menjadi penting agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memberikan pelayanan yang lebih profesional. Pengembangan fitur sistem yang lebih sederhana dan *user-friendly* juga perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Masyarakat

Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam implementasi *e-auction*, disarankan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama

KPKNL Semarang meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem *e-auction*. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital, guna meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga partisipasi dalam lelang elektronik semakin optimal. Selain itu, penguatan aspek keamanan sistem juga perlu menjadi prioritas untuk melindungi data dan transaksi dari potensi ancaman siber. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna layanan diharapkan dapat lebih proaktif dalam memahami prosedur dan mekanisme *e-auction* agar dapat berpartisipasi secara efektif dan memanfaatkan sistem secara maksimal.